



LAPORAN KINERJA INDIVIDU

TRIBUNAN II

TAHUN 2025

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN LUMAJANG

NAMA	: PATRIA DWI HASTIADI, AP. M.Si
NIP	: 19740910 199412 1 001
PANGKAT	: Pembina Utama Muda
GOLONGAN	: IV/c
JABATAN	: KEPALA PELAKSANA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Triwulan II Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari peran serta pimpinan dan staf Badan Penanggulangan yang telah bekerja sama untuk melaksanakan pembuatan laporan ini.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bentuk komitmen untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* dalam rangka membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 – 2026 guna mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar.

Tujuan penyampaian Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja yang terukur dan transparansi dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good government*) dan juga merupakan wujud pelaksanaan tugas dan fungsi serta penjabaran atas pelaksanaan program kerja dan penggunaan anggaran tahun 2025 dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini juga sekaligus menjadi sarana evaluasi kinerja selama satu tahun anggaran sehingga dapat memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan dalam pencapaian kinerja pada masa mendatang yang lebih produktif, efektif dan efisien.

Kami sadar bahwa dalam penyajian informasi Laporan Kinerja ini tentunya masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna, kritik dan saran yang membangun sangat kami butuhkan untuk perbaikan penyusunan pada masa yang akan datang.

Lumajang, 4 Juli 2025
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah



PATRIA DWI HASTIADI, AP, M.Si
NIP. 19740910 199412 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Gambaran Umum.....	1
1.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah	1
1.1.2 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	3
1.1.3 Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah	6
1.1.4 Sumber Daya Sarana dan Prasarana.....	6
1.2. Isu Strategis	10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	12
2.1. Target Tujuan OPD	12
2.1.1 Sasaran.....	12
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
3.1. Pengukuran Kinerja.....	14
3.2. Analisis Capaian Kinerja	17
3.3. Analisis Capaian Kinerja Lainnya	30
3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan II Tahun 2025 Dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Lain	33
BAB IV. PENUTUP	32
4.1. Kesimpulan	33
4.2. Langkah Ke Depan	33
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL I	
Tabel 1.1 Komposisi Pegawai.....	6
Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana per Tanggal 31 Maret 2025	7
TABEL II	
Tabel 2.1 Tujuan Indikator	12
Tabel 2.2 Tujuan Sasaran	13
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja KepalaBPBD Tahun 2025	13
TABEL III	
Tabel 3.1 Skala Nilai Kriteria Capaian Kinerja	15
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025	15
Tabel 3.3 Capaian Kinerja per Program pada BPBD Kabupaten Lumajang Triwulan I Tahun 2025	16
Tabel 3.4 Data Kinerja Sasaran BPBD Tahun 2025	17
Tabel 3.5 Penghitungan Efisiensi Sumber Daya Kinerja Sasaran BPBD	20
Tabel 3.6 Analisis per Indikator Kinerja yang Berkaitan Langsung dengan Indikator Kinerja Program	21
Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Triwulan I, II, III, IV ..	23
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standart Nasional	33

BAB I

PENDAHULUAN

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja di setiap perangkat daerah berdasarkan pada perencanaan kinerja yang telah disusun pada tahun sebelumnya dan dituangkan dalam perjanjian kinerja. Waktu penyampaian laporan kinerja paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Instansi Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Adanya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian kerjanya direspon sebagai bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja organisasi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyusun Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 secara sistematis untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan dalam rangka mewujudkan *Good Governance* serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

1.1 GAMBARAN UMUM

1.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

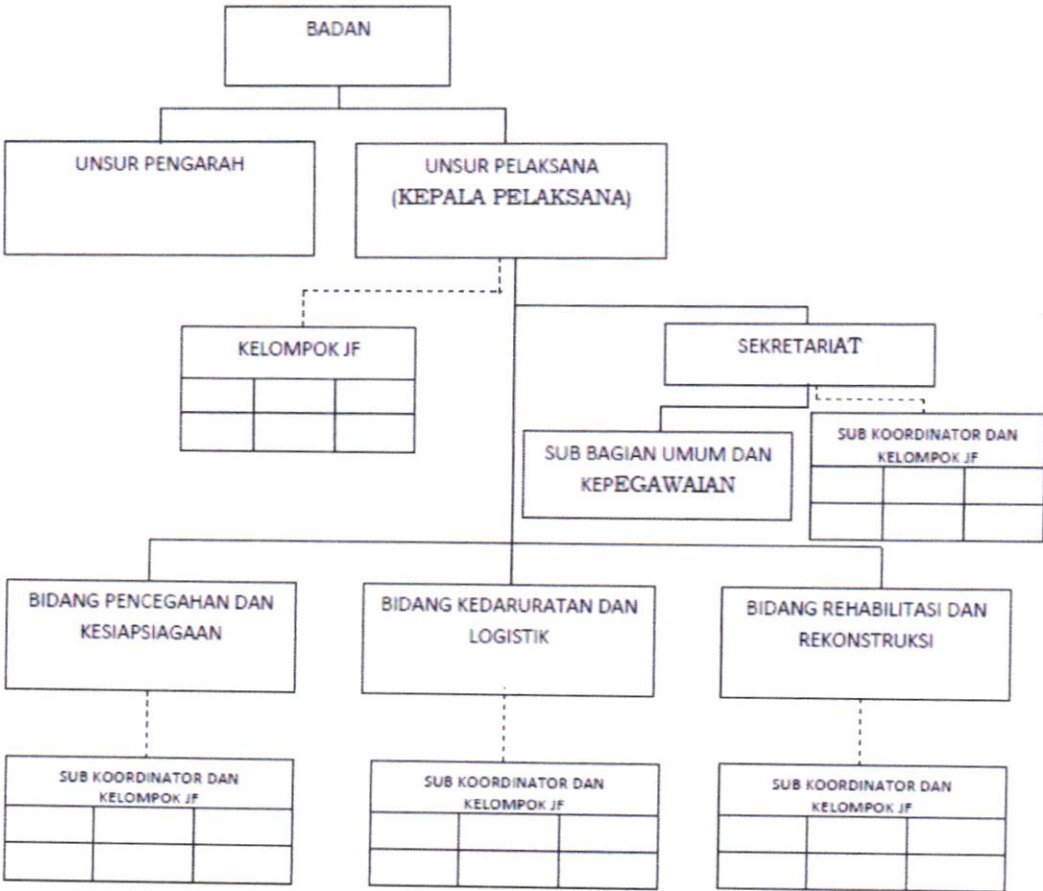
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang sub urusan bencana yang dipimpin oleh Kepala Badan yang secara

Ex Officio dijabat oleh Sekretaris Daerah. Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati dimaksud, susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas :

- 1. Unsur Pengarah
- 2. Unsur Pelaksana, terdiri atas :
 - 1) Kepala Pelaksana
 - 2) Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional
 - 4) Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional
 - 5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas :
Kelompok Jabatan Fungsional
 - 6) Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun bagan struktur organisasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang adalah sebagaimana berikut



Bagan 1.1 Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1.1.2 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan tugas: (i) perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana daerah dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan (ii) pengorganisasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. menyelenggarakan penanggulangan bencana;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai tugas pokok dan fungsi.

❖ Sekretariat,

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerja sama. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan program dan kegiatan Sekretariat;
2. pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan Badan;
3. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
4. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
5. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
6. pengoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana;
7. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi;
9. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Pelaksana; dan

10. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan Kepala Pelaksana.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. mengoordinasikan perumusan kebijakan di lingkungan Badan;
3. melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga;
4. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
5. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
6. mengoordinasikan dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana;
7. melaksanakan pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
8. mengatur dan mengendalikan penyimpanan, pemeliharaan, pengamanan, dan penggunaan barang-barang inventaris dan aset Badan;
9. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas;
10. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris; dan
11. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan Sekretaris.

❖ **Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan rencana program dan kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
2. perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
4. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
5. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi;
7. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Pelaksana; dan

8. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan Kepala Pelaksana.

❖ **Bidang Kedaruratan dan Logistik**

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada keadaan darurat bencana, penanganan pengungsi dan dukungan logistik. Dalam melaksanakan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan rencana program dan kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik;
2. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada keadaan darurat bencana, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
3. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada keadaan darurat bencana, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
4. pelaksanaan komando penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana;
5. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada keadaan darurat bencana, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
6. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada keadaan darurat bencana, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi;
8. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Pelaksana; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan Kepala Pelaksana.

❖ **Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana serta pemberdayaan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penyusunan rencana program dan kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
2. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
3. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
4. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
5. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
6. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi;

7. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Pelaksana; dan pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan Kepala Pelaksana.

1.1.3 Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah

Untuk menjalankan tugas dan fungsi secara optimal, Badan Penanggulangan Bencana Daerah didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 61 (enam puluh satu) orang (kondisi per 31 Maret 2025), dengan komposisi pegawai ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai

No	Jabatan Dalam Organisasi	Jenis Kelamin		Status Kepegawaian			Ijazah							Eselon			Ket.
		L	P	PNS	P3K	TKB	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	2	3	4	
1.	Kepala Pelaksana	1		1								1		1			
2.	Sekretaris																
3.	Kepala Bidang	2		2					1		1				2		
4.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		1	1						1						1	
5.	Pejabat Fungsional	11	4	2	13						15					2	
6.	Pejabat Pelaksana	3	1	4					2		2						
7.	Tenaga Kontrak	35	6			41			16		25						
Jumlah		52	12	10	13	41			19	1	43	1		1	2	3	

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, total pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah per 31 Juni 2025 sebanyak 64 orang dengan rincian jumlah pejabat struktural sebanyak 8 orang, pejabat fungsional sebanyak 15 orang, pejabat pelaksana sebanyak 4 orang, pejabat PNS sebanyak 10 orang, PPPK sebanyak 13 orang dan tenaga kontrak sebanyak 41 orang. Perbandingan pegawai laki-laki dan perempuan pada sebesar 83,60% : 18,75% dengan pegawai laki-laki sebanyak 52 orang dan perempuan sebanyak 12 orang.

1.1.4 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah selain didukung oleh sumber daya manusia juga ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan standar pelayanan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat selaku pengguna layanan. Adapun sarana prasarana pendukung yang tersedia pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah disajikan pada tabel 1.2 di bawah ini :

Tabel 1.2
Sarana dan Prasarana per Tanggal 31 Juni 2025

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan/ Kondisi Barang		
				B	RR	RB
	ALAT - ALAT BESAR		48			
1	Generator / Genset	Unit	4			4
2	Pompa Dongki	Unit	1	1		
3	Pompa Air	Unit	15	13	2	
4	Pompa Apung Penyedot Pasir (Ponton)	Unit	1			1
5	Mesin Perahu 18 PK	Unit	2		1	1
6	Masin Perahu Kap.9.8 PK	Unit	2			2
7	Masin Perahu Karet Kap 25 PK	Unit	1			1
8	Genset 5 KVA	Unit	3	3		
9	Wheel Loader	Unit	1	1		
10	Genset 5.000 W	Unit	5	5		
11	Pompa jinjing	Unit	3	3		
12	Selang Caupling Machino	Unit	10	10		
	ALAT ANGKUTAN		39			
1	Mobil	Unit	2	1	1	
2	Mobil Tangki	Unit	2	2		
3	Sepeda Motor	Unit	4		4	
4	Perahu Karet 6 Orang	Unit	1		1	
5	Perahu karet 10 Orang	Unit	1			1
6	Perahu Polyethylene	Unit	4	4		
7	Perahu Lipat 4,2 m	Unit	1	1		
8	Mobil Rescue	Unit	1		1	
9	Motor Trail	Unit	9	7		2
10	Mobil Tangki Air	Unit	6	6		
11	Mobil Dalmas	Unit	1	1		
12	Mobil Operasional	Unit	2	2		
13	Sepeda Motor	Unit	1	1		
14	Mobil Dapur Lapangan	Unit	1	1		
15	Perahu karet	Unit	3	3		
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		3			
1	GPS	Unit	3			3
	ALAT PERTANIAN		52			
1	Gergaji Mesin (Tanpa Pedang)	Unit	1			1
2	Gergaji Mesin (Sthill)	Unit	3	1	2	
3	Chainsaw kecil	Unit	5	5		
4	Chainsaw Sedang	Unit	4	4		
5	Jet Sprayer	Unit	26	26		
6	Pemotong dahan	Unit	2	2		
7	Chain saw	Unit	8	8		
8	Chain saw besar	Unit	1	1		
9	Jet Shooter Water	Unit	2	2		
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		519			
1	Karmantel	Unit	2	2		
2	Body Harness	Unit	3	3		
3	Carabiner Snap	Unit	5	5		
4	Seat Harness	Unit	2	2		

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan/ Kondisi Barang		
				B	RR	RB
5	Brankas	Unit	1	1		
6	Almari Arsip	Unit	11	11		
7	Mesin Ketik	Unit	2			2
8	filing cabinet	Unit	2	2		
9	Rak Arsip Data	Unit	2	2		
10	Rak Besi	Unit	2	2		
11	Running Text	Unit	1	1		
12	Papan Data	Unit	12	12		
13	Velbed	Unit	98	90		8
14	Neon Box	Unit	6	1	5	
15	Meja Staf	Unit	22	17	5	
16	Meja Resepsionis	Unit	1	1		
17	Meja Kursi Tamu	Unit	1			1
18	Sofa	Unit	2	2		
19	Gorden	Unit	16	16		
20	Tempat cuci tangan portable	Unit	18	18		
21	Senter	Unit	30	30		
22	Mesin Potong Rumput	Unit	2	2		
23	AC Split	Unit	14	14		
24	TV	Unit	3	3		
25	TV Standing Promosi	Unit	1	1		
26	TAPE	Unit	1	1		
27	Speaker Aktif	Unit	1	1		
28	Sound System	Unit	1	1		
29	Megaphone	Unit	4	4		
30	Power Supply	Unit	4	2	1	1
31	UPS	Unit	1	1		
32	Camera	Unit	3	1	2	
33	Dispenser	Unit	1	1		
34	Handy Cam	Unit	2	1	1	
35	Tripod Rescue	Unit	1	1		
36	Jumar	Unit	2	2		
37	Teleskop	Unit	2	2		
38	Early Warning System (EWS)	Unit	2		1	1
39	DVD	Unit	1			1
40	Tandon Air	Unit	41	31	6	4
41	Dudukan Tandon Air	Unit	74	63	8	3
42	RIG	Unit	1		1	
43	SSB	Unit	1		1	
44	Senter Rescue HID Searchihth	Unit	1		1	
45	Tandu Basket	Unit	1	1		
46	Alat Pemadam Api Ringan	Unit	4	4		
47	Tabung Selam	Unit	1	1		
48	Masker Selam	Unit	1	1		
49	Regulator Tabung Selam	Unit	1	1		
50	IDS Blayer	Unit	1	1		
51	Drone	Unit	1	1		
52	Tripod/ Standing Sound	Unit	1	1		
53	Fleksible tank	Unit	1	1		
54	Tiang lampu tenda	Unit	6	6		
55	Meja Eselon II	Unit	1		1	

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan/ Kondisi Barang		
				B	RR	RB
56	Meja Eselon III	Unit	3		3	
57	Meja Eselon IV	Unit	6		6	
58	Meja Kerja	Unit	5	5		
59	Kursi Eselon II (Kursi Putar)	Unit	1		1	
60	Kursi Eselon III (Kursi Putar)	Unit	3		3	
61	Kursi Eselon IV (Kursi Putar)	Unit	6		6	
62	Kursi Pejabat	Unit	7	7		
63	Kursi Kerja	Unit	5	5		
64	Almari Arsip Penjabat	Unit	5		5	
65	Drone	Unit	1	1		
66	TV Display	Unit	3	3		
67	Kipas Angin	Unit	16	16		
68	Microphone table stand	Unit	3	3		
69	Sound System	Unit	2	2		
70	Kasur lipat	Unit	15	15		
71	Meja kursi kerja wakil bupati	Unit	1	1		
72	Toren air + kaki penyangga	Unit	4	4		
73	Meja Kayu Pejabat	Unit	3	3		
74	Emergency Portable Lamp	Unit	7	7		
75	Light Tower	Unit	1	1		
	ALAT STUDI, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		172			
1	Unintemuptible Power Supply (UPS)	Unit	4			4
2	LCD Proyektor	Unit	2	1		1
3	Handphone CDMA	Unit	1			1
4	HT	Unit	94	17	25	52
5	HT VHF Single Band	Unit	50	35	9	6
6	Mesin Fax	Unit	1	1		
7	RIG	Unit	1		1	
8	HF All Band Transceiver	Unit	1			1
9	Early Warning System (EWS)	Unit	6	2	3	1
10	Repitel	Unit	3	1	2	
11	Antena VHF	Unit	2			2
12	Tower Antena	Unit	1		1	
13	Kabel VHF	Unit	1			1
14	Rapiter	Unit	1	1		
15	RIG	Unit	1	1		
16	HP	Unit	3	3		
	ALAT KEDOKTERAN		17			
1	Thermogun	Unit	14	14		
2	Bilik Sico	Unit	2	2		
3	Tabung Oksigen	Unit	1	1		
	ALAT PERSENJATAAN		26			
1	Tali Webbing	Unit	1	1		
2	Karmatelstatis	Unit	1	1		
3	Tali tambang polypropylene	Unit	1	1		
4	Safty rope grap	Unit	1	1		
5	Pully twin catrol double resque	Unit	1	1		
6	Tabung SCBA	Unit	1	1		
7	Helm Safety	Unit	20	20		

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Keterangan/ Kondisi Barang		
				B	RR	RB
	KOMPUTER		52			
1	Komputer (PC Desktop)	Unit	14	8	6	
2	Laptop	Unit	13	9	4	
3	Hardisk	Unit	1	1		
4	Printer A3	Unit	1			1
5	Printer	Unit	17	10	5	2
6	Printer Dot Matrix	Unit	1	1		
7	Printer Laser Jett	Unit	2	2		
8	Scanner	Unit	1	1		
9	Server Desiminasi Info BMG	Unit	1			1
10	Modem	Unit	1	1		
	ALAT KEAMANAN KERJA		125			
1	Tenda Pleton	Unit	6			6
2	Tenda Posko	Unit	4		2	2
3	Tenda Regu	Unit	3			3
4	Tenda Keluarga	Unit	64	59		5
5	WTP	Unit	1		1	
6	Tenda Penggungsi	Unit	10	9	1	
7	Tenda MCK	Unit	4	4		
8	Tenda Sangga	Unit	2	2		
9	Pelampung Evakuasi	Unit	30	30		
10	Tenda VIP	Unit	1	1		
	RAMBU – RAMBU		60			
1	Rambu Peringatan Erupsi Gunung Lamongan	Unit	6		2	4
2	Rambu Peringatan Erupsi gunung Semeru	Unit	11		6	5
3	Rambu Jalur Evakuasi	Unit	37		22	15
4	Rambu Jalur Evakuasi Tempat Pengungsian	Unit	1		1	
5	Rambu Jalur Evakuasi Titik Kumpul	Unit	1		1	
6	Rambu Peringatan Daerah Rawan Bencana Longsor	Unit	1			1
7	Rambu Jalur Evakuasi Tempat Pengungsian	Unit	1		1	
8	Rambu Peringatan Daerah Rawan Bencana Tsunami	Unit	2			2
JUMLAH				798	162	153

Keterangan :

B = Baik

RR = Rusak Ringan

RB = Rusak Berat

1.2 ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi

Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Perumusan isu strategis diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah di periode mendatang.

Isu-isu strategis yang perlu diperhatikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah diantaranya :

1. Belum adanya regulasi tentang Penetapan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)
2. Belum adanya regulasi dokumen Rencana Kontijensi (Renkon) Per jenis bencana
3. Potensi bencana yang tinggi di Lumajang berdasar letak geografis

Upaya mitigasi bencana, penanganan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana belum optimal.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. TARGET TUJUAN OPD

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari misi yang akan dicapai atau yang akan dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga memungkinkan BPBD, memproyeksikan sejauh mana pencapaian visi dan misi tersebut bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu, agar dapat diukur ketinggian dalam mencapai tujuan strategi, setiap tujuan strategis yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur sehingga arah kebijakan mudah ditentukan dengan jelas.

Sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026, tujuan yang ditetapkan BPBD Kabupaten Lumajang, antara lain:

Tabel 2.1
Tujuan – Indikator

No	Tujuan	Indikator Tujuan
1	Terciptanya Kesiapsiagaan Bencana dan Rasa Aman	Indeks Risiko Bencana

2.1.1 SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan Sasaran strategis BPBD Kabupaten Lumajang merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja BPBD. Sasaran strategis yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan tujuan strategis terkait juga telah dicapai. Sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tujuan visi dan misi Kepala Daerah, maka sasaran BPBD, yaitu :

Tabel 2.2
Tujuan – Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	
		Uraian	Indikator
1	Terciptanya Kesiapsiagaan Bencana dan Rasa Aman	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah

Kinerja sasaran harus dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja untuk mewujudkan tercapainya Indikator Kinerja Sasaran. Kinerja sasaran BPBD diampu oleh Kepala Pelaksana BPBD sebagai bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,79

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.	3.567.247.924,08	DAU
2.	Penanggulangan Bencana	Rp.	3.255.068.250,00	DAU
JUMLAH		Rp.	6.822.316.174,08	

Perjanjian Kinerja Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang Tahun 2025 mengampu 1 (satu) sasaran kinerja, yaitu Meningkatkan Kapasitas Penanggulangan Bencana dengan indikator kinerja Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana dengan target 0,79.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. PENGUKURAN KINERJA

- **CAPAIAN KINERJA TUJUAN & SASARAN STRATEGIS OPD S/D TW II TAHUN 2025**

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan indikator yang telah ditetapkan dengan capaian yang telah diraih. Indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja menjadi acuan dalam menilai capaian kinerja baik triwulan maupun tahunan. Langkah pembandingan ini akan menunjukkan selisih kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mendapatkan strategi yang tepat dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*). Pengukuran kinerja disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya yang mendukung pada pencapaian indikator program.

Format pengukuran kinerja menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja (Bernilai Positif), maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi} - \text{Target}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja (Bernilai Negatif), digunakan rumus:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Selanjutnya guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Lumajang digunakan skala ordinal nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Kriteria Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Capaian Kinerja	Kriteria Capaian Kinerja
1.	> 90%	Sangat Tinggi
2.	> 75% - 90%	Tinggi
3.	> 65% - 75%	Sedang
4.	> 50% - 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per Triwulan				Realisasi Total	Capaian (%)
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
	Tujuan								
1	Terciptanya Kesiapsiagaan Bencana dan Rasa Aman	Indeks Risiko Bencana	107,18	107,18	107,18	0,00	0,00	107,18	100
	Sasaran								
1	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,79	0,78	0,00	0,00	0,00	0,78	98,73

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

❖ **Tujuan :**

Indikator kinerja tujuan terealisasi sebesar 107,18 dengan capaian kinerja 100%. Hasil Penghitungan Nilai IRB sementara masih mengacu pada nilai IRB tahun 2024 dari BPBD Provinsi Jawa Timur dikarenakan untuk hasil nilai IRB Tahun 2025 masih menunggu perhitungan dari BNPB. Proses perhitungan nilai IRB dilaksanakan setahun sekali setelah tahun anggaran berakhir.

❖ **Sasaran Strategis**

Berdasarkan Hasil Penilaian dari BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Timur melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan nilai Indeks Ketahanan Daerah 0,78 atau dengan kata lain belum tercapai 100% sesuai dengan target karena nilai IKD dapat diketahui setiap akhir tahun anggaran. Pengukurannya berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana.

Penghitungan Nilai IKD sementara masih mengacu pada nilai IKD tahun 2024 dari BPBD Provinsi Jawa Timur dikarenakan untuk hasil nilai IKD Tahun 2025 dapat dilakukan perhitungan setiap tahun anggaran berakhir.

- **CAPAIAN KINERJA PROGRAM YANG MENUNJANG KINERJA SASARAN OPD**
Pada Triwulan II Tahun 2025, BPBD Kabupaten Lumajang capaian kinerja program yang menunjang kinerja sasaran secara detail tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 3.3
Capaian Kinerja per program pada BPBD Kabupaten Lumajang
Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran	Program	Indikator Sasaran Perangkat Daerah/Program (Outcome)	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana	Penanggulan gan Bencana	Persentase Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana	52,20%	50,73%	97,18%
2	Terselenggara nya Fasilitasi Kebutuhan Operasional Kantor	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran	100%	54,30%	54,30%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan, sebagai berikut :

1. Formulasi Penghitungan Kinerja Program 1

Indikator sasaran Program Penanggulangan Bencana adalah Persentase Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana dengan formulasi penghitungan kinerjanya yaitu Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dibagi Jumlah Desa/Kelurahan se-Kabupaten Lumajang dikali 100%. Program ini mengakomodir 104 Desa/Kelurahan yang telah diberikan yang sudah dibentuk atau dibina menjadi Desa Tangguh Bencana (Destana) sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dibanding 205 Jumlah Desa/Kelurahan se-Kabupaten Lumajang dikali 100% yaitu sebesar 50,73% dengan capaian kinerja 97,18%. Kegiatan Pembinaan dan Pembentukan Destana sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dilaksanakan di Desa Ranupani Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang

2. Formulasi Penghitungan Kinerja Program 2

Indikator sasaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota adalah Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebutuhan Operasional Perkantoran dengan formulasi penghitungan kinerjanya yaitu Jumlah Fasilitasi Kebutuhan Operasional Kantor Yang Dipenuhi dibagi Jumlah Fasilitasi Kebutuhan Operasional Kantor Yang Direncanakan dikali 100%. Program ini mengakomodir 183 fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran yang difasilitasi sampai dengan

Triwulan II Tahun 2025 dibanding 337 fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran yang direncanakan Tahun 2025 dikali 100% yaitu sebesar 54,30% dengan capaian kinerja 54,30%. Capaian kinerja tersebut tergolong Sangat Tinggi untuk capaian sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

• **PENYAJIAN DATA KINERJA**

Berikut tabel data kinerja sasaran BPBD Kabupaten Lumajang Tahun 2025 :

Tabel 3.4
Data Kinerja Sasaran BPBD Kabupaten Lumajang Tahun 2025

No	Uraian	Indikator Kinerja Utama	Data Kinerja	Keterangan
1	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Hasil Penghitungan Indikator Ketahanan Daerah Tingkat Kabupaten melalui FGD dengan BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Timur	

Data kinerja sasaran Meningkatkan Kapasitas Penanggulangan Bencana berupa Hasil Penghitungan Indikator Ketahanan Daerah Tingkat Kabupaten melalui FGD dengan BNPB dan BPBD Provinsi Jawa Timur.

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

• **ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**

- ❖ **Tujuan :** Terciptanya Kesiapsiagaan Bencana dan Rasa Aman

Tujuan Terciptanya Kesiapsiagaan Bencana dan Rasa Aman dengan indikator Indeks Risiko Bencana, capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar 100% (tercapai), hal ini didukung dengan adanya :

 - a. Terjalinnya koordinasi dan kolaborasi pentahelix penanggulangan bencana dengan baik
 - b. Tersusunnya beberapa dokumen penanggulangan bencana diantaranya:
 - Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029
 - Dokumen Kajian Risiko Bencana
 - Dokumen Rencana Rehabilitasi, Rekonstruksi Pascabencana (R3P)
 - Dokumen Rencana Kontingensi Banjir
 - Dokumen Rencana Kontingensi Gempa Bumi
 - Dokumen Rencana Kontingensi Tanah Longsor
- ❖ **Sasaran Strategis :** Meningkatkan Kapasitas Penanggulangan Bencana

Sasaran Meningkatkan Kapasitas Penanggulangan Bencana dengan Indeks Ketahanan Daerah, capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar 100% (tercapai), hal ini didukung dengan adanya:

- a. Updating data untuk mempertahankan dokumen penunjang penilaian Indeks Ketahanan Daerah
- b. Tersusunnya dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3P)
- c. Terlaksananya kegiatan sosialisasi kebencanaan serta pembinaan dan pembentukan Destana

❖ **Program Penanggulangan Bencana** : Meningkatnya Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana

Meningkatnya Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana dengan indikator Persentase Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana. Capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar 50,73% (tercapai), hal ini didukung dengan adanya :

- a. Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pembentukan Desa Tangguh Bencana di Desa Ranupani Kecamatan Senduro.
- b. Meningkatnya jumlah kegiatan Sosialisasi Kebencanaan di beberapa Desa, Sekolah dan Komunitas mulai usia dini hingga lansia
- c. Terlaksananya kegiatan geladi lapang kesiapsiagaan bencana di Desa Ranupani Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang

❖ **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota** :

Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran Terselenggaranya Fasilitas Kebutuhan Operasional Kantor dengan indikator Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran. Capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar 54,30% (tercapai), hal ini didukung adanya :

- a. Kerjasama yang baik dengan rekan kerja dan atasan langsung dalam pencapaian kinerja program dan kegiatan pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang
- b. Adanya upaya meningkatkan kompetensi dan kemampuan dalam bekerja dan berkinerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada
- c. Kondisitas lingkungan Sekretariat yang mendukung kenyamanan bekerja.

• **ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**

❖ Penyebab kegagalan Tujuan Terciptanya Kesiapsiagaan Bencana dan Rasa Aman dengan indikator Indeks Risiko Bencana, sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Intensitas kejadian bencana di Kabupaten Lumajang
- b. Dokumen KRB belum sesuai dengan Perka BNPB Nomor 2 Tahun 2012

❖ Penyebab kegagalan Sasaran Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana, sebagai berikut :

- a. Dokumen KRB belum sesuai dengan Perka BNPB Nomor 2 Tahun 2012
- b. Penyusunan Dokumen Renkon belum optimal

- ❖ Penyebab kegagalan Program Penanggulangan Bencana dengan sasaran Meningkatkan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana, sebagai berikut :
 - a. Tingginya tingkat ancaman bencana alam yang tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi
 - b. Belum semua Desa rawan bencana dibentuk Desa Tangguh Bencana
- ❖ Penyebab kegagalan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan sasaran Terselenggaranya Fasilitas Kebutuhan Operasional Kantor dengan indikator Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran, sebagai berikut :
 - a. Masih kurangnya keinginan sebagian personal meningkatkan kemauan dan kemampuan sesuai tupoksi.
 - b. Adanya kebijakan pemerintah daerah terkait perubahan proporsi anggaran yang merubah kas/ *time schedule*.
- **UPAYA/ SOLUSI UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM MENCAPAI KINERJA**

Upaya/ solusi untuk mengatasi hambatan dalam mencapai kinerja dapat dijelaskan, sebagai berikut :

- ❖ Analisis upaya untuk mengatasi permasalahan Tujuan Terciptanya Kesiapsiagaan Bencana dan Rasa Aman dengan indikator Indeks Risiko Bencana, sebagai berikut :
 - a. Penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana
 - b. Penguatan mitigasi bencana dengan kolaborasi lintas sektor
- ❖ Analisis upaya untuk mengatasi permasalahan Sasaran Meningkatkan Kapasitas Penanggulangan Bencana, sebagai berikut :
 - a. Penganggaran secara bertahap (Tahun 2025 telah dianggarkan untuk penyusunan 1 Dokumen Renkon)
 - b. Menunjuk tenaga ahli untuk melakukan pengkajian ulang penyusunan Dokumen KRB
- ❖ Analisis upaya untuk mengatasi permasalahan Program Penanggulangan Bencana dengan sasaran Meningkatkan Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana, sebagai berikut :
 - a. Penguatan kapasitas daerah terutama pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
 - b. Pembinaan dan Pembentukan Desa Tangguh Bencana di semua Desa/Kelurahan Kabupaten Lumajang
- ❖ Analisis upaya untuk mengatasi permasalahan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan sasaran Terselenggaranya Fasilitas Kebutuhan Operasional Kantor dengan indikator Persentase Pemenuhan Fasilitas Kebutuhan Operasional Perkantoran, sebagai berikut :

- a. Memberikan motivasi terhadap personal Sekretariat yang belum optimal dalam berkemauan dan berkemampuan terhadap tupoksi.
- b. Melakukan koordinasi lintas bidang secara berkala terkait pemenuhan kebutuhan kegiatan Sekretariat.

• **ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA**

Berikut analisis efisiensi sumber daya menggunakan formulasi. Formulasi perhitungan Efisiensi Sumber Daya, sebagai berikut :

Efisiensi = Capaian Kinerja – Capaian Anggaran

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah didukung dengan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan seluruh program kerja didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Akuntabilitas anggaran dihitung dari setiap sasaran yang didukung dengan berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Penghitungan Efisiensi Sumber Daya Kinerja Sasaran BPBD
Triwulan II Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	Anggaran Program	% Realisasi Anggaran	Nilai Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7(4-6)
1	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	98,73%	Program Penanggulangan Bencana sejumlah Rp. 3.255.068.250,00 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota sejumlah Rp. 3.567.247.924,08 Total : Rp. 6.822.316.174,08	45,28%	53,45%

Pada Tabel 3.5 ditunjukkan bahwa pada Triwulan II Tahun 2025 anggaran untuk mencapai sasaran terdiri dari anggaran pada Program Penanggulangan Bencana sejumlah Rp. 3.255.068.250,00 dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota sejumlah Rp. 3.567.247.924,08 dengan total anggaran dari 2 program tersebut adalah sejumlah Rp. 6.822.316.174,08. Total realisasi anggaran dari masing-masing program Rp. 1.314.807.809,00 (40,39%) dan Rp. 1.630.400.820,00 (45,70%) adalah sebesar Rp. 2.945.208.629,00 atau (43,17%)

sedangkan capaian kinerja sasaran sebesar 100%. Hal ini sudah mencapai kinerja anggaran yang direncanakan (100%). Artinya, dengan penyerapan sebesar (43,17%) output yang dicapai 98,73%, sehingga ada efisiensi sebesar (53,45%).

• **ANALISIS PROGRAM YANG PENUNJANG KEBERHASILAN**

Penghitungan Capaian Kinerja per program pada BPBD Kabupaten Lumajang Triwulan II Tahun 2025 bisa dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6
Analisis per Indikator Kinerja yang Berkaitan Langsung dengan Indikator Kinerja Program

No	Program	Capaian Kinerja	Keterangan
1	2	3	4
1	Penanggulangan Bencana	97,18%	Menunjang secara langsung
2	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	54,30%	Menunjang secara tidak langsung

Berikut analisis dari tabel diatas :

1. Program Penanggulangan Bencana secara langsung menunjang pencapaian kinerja “Meningkatnya Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana” dengan indikator “Persentase Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana”. Indikator program ini dapat terealisasi karena
 - a. Terlaksananya kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) di beberapa Desa, Sekolah dan Komunitas mulai usia dini hingga lansia
 - b. Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) di Desa Ranupani Kecamatan Senduro
 - c. Terlaksananya kegiatan geladi lapang kesiapsiagaan bencana di Desa Ranupani Kecamatan Senduro
 - d. Optimalnya Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
 - e. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi penanganan pascabencana
 - f. Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana
 - g. Tersusunnya dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (R3P)
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota tidak menunjang secara langsung capaian indicator kinerja sasaran karena kegiatan yang dilaksanakan terkait kegiatan rutin kantor saja.

- **REALISASI ANGGARAN**

Pada Triwulan II Tahun 2025, jumlah alokasi anggaran BPBD Kabupaten Lumajang sebesar Rp. 6.822.316.174,08. Sedangkan realisasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 2.945.208.629,00 atau sebesar 43,17%, penyerapan anggaran masih tergolong rendah dikarenakan adanya efisiensi anggaran. Secara detail penyerapan anggaran per kegiatan per program tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2025

No	Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Pagu Perubahan Anggaran	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PENANGGULANGAN BENCANA	3.255.068.250,00	-	360.059.550,00	11,06	954.748.259,00	40,39	-	-	-	-
a	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	172.800.000,00	-	23.360.000,00	13,52	43.520.000,00	38,70	-	-	-	-
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	172.800.000,00	-	23.360.000,00	13,52	43.520.000,00	38,70	-	-	-	-
b	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	940.290.000,00	-	69.292.000,00	7,37	265.333.000,00	35,59	-	-	-	-
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	278.583.000,00	-	14.518.000,00	5,21	59.386.000,00	26,53	-	-	-	-
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	221.160.000,00	-	20.250.000,00	9,16	48900000	31,27	-	-	-	-
	Penyusunan Rencana Kontijensi	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Pagu Perubahan Anggaran	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	133.787.000,00	-	-	-	64525000	48,23	-	-	-	-
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	281.760.000,00	-	34.524.000,00	12,25	92522000	45,09	-	-	-	-
c	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.902.333.000,00	-	243.587.550,00	12,80	592.130.259,00	43,93	-	-	-	-
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1.302.493.000,00	-	174.503.550,00	13,40	402.046.259,00	44,27	-	-	-	-
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	200.000.000,00	-	15.360.000,00	7,68	58.080.000,00	36,72	-	-	-	-
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	399.840.000,00	-	53.724.000,00	13,44	132.004.000,00	46,45	-	-	-	-
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	239.645.250,00	-	23.820.000,00	9,94	53.765.000,00	32,37	-	-	-	-
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	119.200.000,00	-	11.200.000,00	9,40	19.740.000,00	25,96	-	-	-	-

No	Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Pagu Perubahan Anggaran	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	120.445.250,00	-	12.620.000,00	10,48	34.025.000,00	38,73	-	-	-	-
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.567.247.924,08	-	706.038.629,00	19,79	924.362.191,00	45,70	-	-	-	-
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.860.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.935.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.495.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1.495.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.495.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.440.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Pagu Perubahan Anggaran	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1.495.000,00	-	-	-	373.750,00	25,00	-	-	-	-
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.495.000,00	-	-	-	373.750,00	25,00	-	-	-	-
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.445.000,00	-	-	-	611.250,00	25,00	-	-	-	-
d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.495.000,00	-	-	-	373.750,00	25,00	-	-	-	-
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.495.000,00	-	-	-	373.750,00	25,00	-	-	-	-
e	Administrasi Umum Perangkat Daerah	481.301.942,00	-	46.013.500,00	9,56	84.477.350,00	27,11	-	-	-	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.367.850,00	-	4.367.850,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.718.870,00	-	9.864.600,00	47,61	-	47,61	-	-	-	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.759.222,00	-	889.550,00	18,69	1.024.750,00	40,22	-	-	-	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.000.000,00	-	980.500,00	5,45	8.643.600,00	53,47	-	-	-	-

No	Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Pagu Perubahan Anggaran	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	433.456.000,00	-	29.911.000,00	6,90	74.809.000,00	24,16	-	-	-	-
f	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.516.573,00	-	-	-	17.840.000,00	82,91	-	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	21.516.573,00	-	-	-	17.840.000,00	82,91	-	-	-	-
g	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	344.781.000,00	-	54.665.899,00	15,86	79.144.060,00	38,81	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.000.000,00	-	18.942.350,00	12,63	33.648.400,00	35,06	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.464.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	181.317.000,00	-	35.723.549,00	19,70	45.495.660,00	44,79	-	-	-	-
h	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	819.121.679,08	-	81.031.000,00	9,89	271.388.100,00	43,02	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan	552.205.000,00	-	62.237.000,00	11,27	134.904.700,00	35,70	-	-	-	-

No	Nama Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Pagu Perubahan Anggaran	Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV	
				Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	217.966.679,08	-	12.569.000,00	5,77	120.075.000,00	60,86	-	-	-	-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.950.000,-	-	6.225.000	12,71	16.408.400,00	46,24	-	-	-	-
	JUMLAH	6.822.316.174,08	-	1.066.098.179,00	15,63	1.879.110.450,00	43,17	-	-	-	-

Dalam upaya pencapaian target kinerja, BPBD Kabupaten Lumajang melaksanakan beberapa program/kegiatan penunjang utama di samping kegiatan administrasi perkantoran dan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang. Program/kegiatan penunjang tersebut, antara lain :

1. Program Penanggulangan Bencana

Melalui program ini yang dianggarkan sebesar Rp. 3.255.068.250,00 untuk 4 Kegiatan dengan rincian 11 Sub Kegiatan, dari anggaran tersebut sudah terealisasi Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 1.314.807.809,00 atau 40,39%.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Melalui program ini yang dianggarkan sebesar Rp. 3.567.247.924,08 untuk 8 Kegiatan dengan rincian 28 Sub Kegiatan, dari anggaran tersebut sudah terealisasi Triwulan II Tahun 2025 sebesar Rp. 1.630.400.820,00 atau 45,70%.

3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA LAINNYA

❖ INOVASI YANG DIMILIKI

1. INOVASI BELI NASI

Pada tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melakukan beberapa inovasi untuk menunjang kinerja antara lain Inovasi “BELI NASI” (Belajar Ilmu Bencana Sejak Dini) merupakan sosialisasi kebencanaan yang menjadi salah satu bagian upaya mitigasi bencana pada sektor pendidikan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang. Tujuannya untuk memberikan edukasi dan membangun kesiapsiagaan masyarakat secara signifikan yang dimulai pada satuan pendidikan yaitu lingkungan sekolah mulai dari siswa, guru dan orangtua.

Penyebutan Inovasi BELI NASI (Belajar Ilmu Bencana Sejak Dini) tidak/belum dimiliki oleh Daerah/Kota/Kabupaten lain di Indonesia. Tidak semua Badan Penanggulangan Bencana Daerah/ Kota/ Kabupaten lain di seluruh Indonesia melakukan Inovasi BELI NASI.

➤ Inovasi tersebut bertujuan untuk :

- a. Sebagai kesiapsiagaan dini terhadap bencana;
- b. Menanamkan rasa sadar bencana;
- c. Memberikan pemahaman tentang rambu-rambu kebencanaan;
- d. Tanggap, tangkas dan tangguh terhadap bencana;
- e. Memberikan pembelajaran untuk penyelamatan diri pada saat kesempatan pertama;
- f. Mengenalkan tas siaga bencana.

➤ Adapun manfaat sesudah menggunakan inovasi diantaranya:

- a. Masyarakat walaupun masih Usia Dini sudah mengenal terkait macam-macam bencana yang ada disekitar kita;
- b. Masyarakat menjadi tanggap terhadap bencana;

- c. Masyarakat paham dengan rambu-rambu kebencanaan;
 - d. Masyarakat menjadi tanggap, tangkas dan tangguh ketika ada bencana melanda;
 - e. Masyarakat menyelamatkan diri sendiri sebelum menyelamatkan orang lain;
 - f. Masyarakat paham tentang Tas Siaga Bencana
- Kendala/Hambatan Pelaksanaan Inovasi
- a. Anak-anak dimungkinkan tidak bisa menerima materi sepenuhnya karena masih usia dini
 - b. Anak-anak yang masih usia dini terkadang ada yang rewel dan bergurau sendiri dengan temannya

Pelaksanaan inovasi ini mendukung tercapainya kinerja dan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) BPBD. Sesuai Permendagri Nomor 101 Tahun 2018, SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerima Pelayanan dasar SPM sub-urusan bencana adalah Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk jenis pelayanan dasar. Pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Inovasi "BELI NASI" ini mendukung tercapainya SPM tahun 2024.

2. INOVASI SI PENA LUSI

Inovasi "SI PENA LUSI" merupakan singkatan dari Sistem Penanggulangan Bencana Inklusif. Kabupaten Lumajang adalah wilayah yang mempunyai risiko bencana tinggi, dari 14 ancaman bencana yang ada di Provinsi Jawa Timur, 12 diantaranya ada di Kabupaten Lumajang. Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir, dari potensi bencana di Kabupaten Lumajang, kita sadar yang harus diutamakan adalah kelompok rentan, disabilitas, lansia, ibu hamil dan anak-anak. Oleh sebab itu, Si Pena Lusi dibentuk untuk melibatkan mereka dalam proses mulai perencanaan pada saat kejadian bencana, memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat selamat dan tanpa kecuali.

- 1) Secara ringkas, latar belakang dibentuknya Program Inovasi Si Pena Lusi adalah:
 - Kabupaten Lumajang merupakan wilayah rawan bencana (erupsi Semeru, banjir lahar, longsor, dll).
 - Kelompok rentan (penyandang disabilitas, lansia, anak-anak, ibu hamil) belum terakomodasi optimal dalam sistem penanggulangan bencana saat ini.
 - Diperlukan sistem inklusif yang mampu merespons kebutuhan semua warga, terutama yang rentan.
- 2) Tujuan Program Inovasi Si Pena Lusi adalah:
 - Membangun sistem penanggulangan bencana yang inklusif dan partisipatif.
 - Meningkatkan kesiapsiagaan seluruh lapisan masyarakat.
 - Mewujudkan Kabupaten Lumajang yang tangguh dan inklusif terhadap bencana.

3) Arti dari Logo Si Pena Lusi



a. Ujung Pena Berwarna Kuning Emas

- **Makna:** Simbol *pengetahuan, komunikasi, dan kebijakan*.
- **Filosofi:** Menggambarkan bahwa setiap kebijakan penanggulangan bencana harus ditulis dan dibentuk dengan dasar inklusif, adil, dan partisipatif. Pena juga menggambarkan komitmen untuk terus belajar dan mencatat praktik baik dari masyarakat.

b. Empat Sosok Manusia dengan Warna Berbeda

- **Makna warna:**
 - **Kuning:** Simbol anak-anak (ceria, masa depan).
 - **Hijau:** Simbol penyandang disabilitas (kehidupan, harapan).
 - **Merah:** Simbol perempuan/lansia (ketahanan, kepedulian).
 - **Biru:** Simbol relawan/masyarakat umum (stabilitas dan kesiapsiagaan).
- **Filosofi:** Melambangkan keragaman masyarakat yang menjadi satu kesatuan, saling bergandengan tangan menghadapi bencana. Menggambarkan inklusivitas yang menjadi roh utama dari program Si Pena Lusi.

c. Lingkaran Oranye

- **Makna:** Lingkaran adalah simbol perlindungan dan kesatuan.
- **Warna oranye:** Warna internasional untuk penanggulangan bencana.
- **Filosofi:** Menunjukkan bahwa seluruh komponen masyarakat berada dalam satu sistem yang saling menjaga dan melindungi dalam menghadapi bencana.

d. Garis Setengah Lingkaran Berwarna Biru

- **Makna:** Melambangkan ketenangan, air, serta elemen alam yang juga bisa menjadi sumber bencana.

- **Filosofi:** Menyiratkan bahwa bencana harus dihadapi dengan ketenangan, kesiapan, dan kesatuan.
- 4) Tulisan “Si Pena Lusi” dan Slogan
- **SI PENA LUSI:** Akronim dari *Sistem Penanggulangan Bencana Inklusif*.
 - **Slogan:** “*Hadapi Bencana Bersama, Tanpa Kecuali*” adalah panggilan moral bahwa tidak boleh ada yang tertinggal, terutama kelompok rentan.
 - **Kabupaten Lumajang:** Identitas wilayah tempat program ini diterapkan sebagai bentuk komitmen daerah.
- 5) Komponen Utama “Si Pena Lusi”
- **Pemetaan Kelompok Rentan Berbasis Data**
(Menggunakan aplikasi / form manual terintegrasi dengan desa dan BPBD).
 - **Pelatihan dan Simulasi Inklusif**
(Pelibatan penyandang disabilitas, relawan, guru, dan keluarga dalam pelatihan kebencanaan)
 - **Pembuatan SOP dan Jalur Evakuasi Inklusif**
(Penyesuaian SOP dan fasilitas evakuasi bagi kelompok rentan)
 - **Penyebaran Informasi Ramah Akses**
(Menggunakan bahasa isyarat, audio, gambar sederhana, serta media sosial)
 - **Pelibatan Komunitas dan Lembaga**
(Sinergi dengan organisasi disabilitas, PKK, karang taruna, PMI, Tagana, relawan desa)

3.4 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025 DENGAN STANDAR NASIONAL/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA LAIN

Perbandingan realisasi tahun ini dengan Standar Nasional/ Provinsi/ Kabupaten/ Kota Lain tampak sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standart Nasional

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Realisasi Kinerja BPBD Provinsi Jawa Timur	Capaian
	Tujuan					
1	Terciptanya Kesiapsiagaan Bencana dan Rasa Aman	Indeks Risiko Bencana	107,18	107,18	101,65	105

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Realisasi Kinerja BPBD Provinsi Jawa Timur	Capaian
	Sasaran					
1	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,79	0,78	0,65	0,13

Realisasi tujuan Terciptanya Kesiapsiagaan Bencana dan Rasa Aman dengan indikator Indeks Risiko Bencana pada tahun ini jika dibandingkan dengan realisasi provinsi masih berada dibawahnya. Akan tetapi jika dibandingkan dengan Kabupaten Jember dengan karakteristik yang sama, posisi Kabupaten Lumajang masih diatasnya. IRB Kabupaten Jember sebesar 130,23 dan nilai kapasitasnya sebesar 0,55.

BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang Triwulan II Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa :

1. Realisasi Indeks Risiko Bencana pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 107,18, menggunakan data realisasi tahun 2024, dengan catatan mempertahankan indikator yang telah tercapai dan meningkatkan nilai capaian yang masih rendah.
2. Indeks Ketahanan Daerah pada Triwulan II Tahun 2025 sebesar 78, juga menggunakan data realisasi tahun 2024.

4.2 LANGKAH KE DEPAN

Berdasarkan hal tersebut di atas, beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan untuk mempertahankan capaian IRB dan IKD Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lumajang, antara lain :

1. Telah diterbitkan instruksi Bupati Lumajang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Penanggulangan Bencana Inklusif.
2. Pembentukan ULD (Unit Layanan Disabilitas) Penanggulangan Bencana Kabupaten Lumajang dengan Keputusan Bupati Lumajang.
3. Mengaktifkan Kader Resiliensi Bencana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 100.3.3.2/1/KEP/427.12/2025 tentang Kader Resiliensi Bencana.
4. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan Pentahelix Penanggulangan Bencana.
5. Mempertahankan capaian Indikator ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana dan meningkatkan capaian indikator yang masih rendah dengan menyusun Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB).
6. Mengintegrasikan perencanaan penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah

LAMPIRAN

- ❖ DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA
- ❖ DOKUMENTASI KEGIATAN
- ❖ DOKUMEN BUKTI DUKUNG DATA KINERJA